

PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR NAGARI MALALAK UTARA KECAMATAN MALALAK)

Muhammad Sidik¹, Ali Rahman², Asyari³, Hesi Eka Putri⁴

^{1,2,3,4}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: sidiksidik1231@gmail.com¹, ali.rahman26des@gmail.com², asyari@uinbukittinggi.ac.id³, hesiekaputeri@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Nagari dalam pengelolaan pasar tradisional, khususnya Pasar Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, dari perspektif Ekonomi Islam. Pasar tradisional merupakan salah satu barang publik yang keberadaannya vital bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaannya menjadi tanggung jawab utama pemerintah. Dalam konteks Ekonomi Islam, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti infrastruktur dan kebersihan, tetapi juga mencakup pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan pasar yang adil, efisien, dan bebas dari praktik-praktik ribawi atau eksploitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang dan pembeli di Pasar Nagari Malalak Utara, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan regulasi pemerintah nagari dalam pengelolaan pasar. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025 dengan beberapa informan, termasuk Ibu Rahina, Bapak Rajab, Ibu Misra (pedagang), dan Ibu Kiki, Ibu Yerniza, Bapak Hendrizal (pembeli).

Kata Kunci: Peran Pemerintah Nagari, Pengelolaan Pasar Tradisional, Ekonomi Islam.

Abstract

This research examines the role of the Nagari Government in the management of traditional markets, specifically the Nagari Malalak Utara Market, Malalak District, from an Islamic Economics perspective. Traditional markets are one of the public goods whose existence is vital for community welfare, making their management a primary responsibility of the government. In the context of Islamic Economics, the government's role is not limited to physical aspects such as infrastructure and cleanliness, but also includes regulations and supervision to realize a fair, efficient market free from usurious or exploitative practices. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with traders and buyers at the Nagari Malalak Utara Market, as well as documentary studies related to the policies and regulations of the nagari government in market management. The interview was conducted on May 5, 2025, with several informants, including Mrs. Rahina, Mr. Rajab, Mrs. Misra (a trader), and Mrs. Kiki, Mrs. Yerniza, Mr. Hendrizal (buyers).

Keywords: *Role of the State Government, Management of Traditional Markets, Islamic Economy.*

PENDAHULUAN

Pemerintah bertanggung jawab atas keberadaan pasar dan manajemennya. Ini disebabkan fakta bahwa pasar merupakan salah satu barang publik yang harus dikelola dengan baik untuk kepentingan umum. Menurut Utami Dewi dan F. Winarni, pemerintah memainkan peran penting dalam pengelolaan pasar, terutama pasar tradisional, dengan menetapkan kebijakan seperti peraturan walikota dan peraturan daerah yang mengatur dinas pengelolaan pasar dalam program pelayanan administrasi perkantoran, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar, optimalisasi pemanfaatan lahan, pengelolaan retribusi, dan pengembangan pasar.

Menurut Utami Dewi et al., "Pengembangan Pasar Tradisional Menghadapi Gempuran Pasar Modern di Kota Yogyakarta", Proseding Simposium Nasional ASIAN III, Universitas, 17 Agustus 1945, 2020, prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan dan transparansi. Untuk Meningkatkan Kepuasan Pedagang di Pasar Lembung, Perspektif Ekonomi Islam Mengubah Pasar Tradisional. Salam Maryam. dan moral dalam setiap perdagangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa transaksi di pasar tradisional tidak hanya sesuai dengan prinsip moral Islam tetapi juga menguntungkan ekonomi. Pemahaman yang buruk tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan pedagang dan masyarakat umum merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pengelolaan pasar tradisional.

Peran Pemerintah dalam Perkembangan Pasar Klasik Pasar tradisional sulit bersaing dengan pasar modern karena kondisinya yang lebih buruk dan tertinggal. Tingkat keuntungan tingkat keuntungan yang menurun merupakan salah satu sinyal

penurunan daya saing pasar tradisional. Ini juga menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern menyebabkan persaingan yang lebih besar untuk mendapatkan pelanggan; pedagang di pasar tradisional berusaha untuk mengurangi margin keuntungan mereka dengan menggunakan mekanisme tawar menawar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan umumnya informan menyatakan pengelolaan pasar kurang mendapat perhatian dari pemerintah nagari, hal ini terlihat ketika dagangan hanya dijual ditepi jalan tanpa ada bangunan pasar atau kios-kios seperti pasar pada umumnya. Di pasar tradisional Malalak utara ini, ada beberapa masalah. Banyak pasar tradisional menghadapi masalah besar terkait infrastruktur yang tidak memadai, yang mengganggu pengunjung. Banyak pasar yang tidak dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti jalan akses yang baik dan area parkir yang memadai, sehingga mengakibatkan kemacetan saat pembeli berbelanja. Situasi ini semakin diperburuk oleh kurangnya kebijakan pemerintah yang jelas mengenai pengaturan mekanisme pasar, sehingga transaksi di pasar sering kali tidak terorganisir dengan baik. Akibatnya, pengalaman berbelanja menjadi kurang menyenangkan bagi konsumen, dan potensi pasar tradisional untuk bersaing dengan pasar modern semakin menurun. Kalimat di atas mencakup berbagai aspek permasalahan yang ada di lapangan terkait pengelolaan pasar tradisional.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peranan, yang didasarkan pada status dan fungsi sosial seseorang, menjelaskan bagaimana seseorang harus bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu. Namun,

Gross, Mason, dan A.W. McEachern, sebagaimana dikutip oleh David Berry, mengatakan bahwa peranan adalah sekumpulan persyaratan yang diberikan kepada seseorang dalam posisi sosial tertentu. Karena harapan tersebut merupakan keseimbangan dari norma-norma sosial, dapat dikatakan bahwa peran itu ditentukan oleh norma-norma masyarakat. Ini berarti bahwa seseorang diharuskan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di tempat kerjanya dan di tempat kerja orang lain.¹

B. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar dapat didefinisikan secara sempit sebagai suatu tempat di mana para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Secara sederhana, pasar dapat didefinisikan sebagai suatu tempat di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa. Pasar juga dapat didefinisikan sebagai himpunan pemrosesan barang dan jasa.²

C. Pasar Tradisional

Dalam pembicaraan secara kongret, pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar menempatkan proses formal jual beli di pusat diskusi ekonomi. Perekonomian selalu bergantung pada pasar. Pasar secara umum adalah tempat di mana penjual dan pembeli bekerja untuk menghasilkan uang atau memenuhi kebutuhan pribadi (Abercrombie, 2010). Para ekonom biasanya melihat pasar sebagai mekanisme penetapan harga dan pertukaran barang. Karena pasar memiliki struktur sosial, pasar juga berfungsi sebagai arena

pertukaran, menurut Jurnal Analisa Sosiologi 3 (1) 5. Menurut Weber, struktur interaksi pasar dimulai dengan perjuangan dan persaingan yang berkembang menjadi pertukaran. Menurut Abercrombie (2010) Dalam suatu pasar, persaingan sangat penting.

D. Ekonomi Islam

Selama tiga dekade terakhir, ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam pendidikan tinggi maupun dalam praktik bisnis. Banyak perguruan tinggi baik di negara-negara muslim maupun barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah mengembangkan pengajaran ekonomi Islam. Di Indonesia juga telah terjadi kemajuan yang pesat dalam pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi islam. Banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, sekarang menawarkan kursus ekonomi islam. Sejak Bank Muamalat didirikan pada tahun 1992, pertumbuhan ekonomi islam telah menjadi lebih cepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan jenis ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan bukti tentang pengelolaan kebun yang berkelanjutan. Ini merupakan studi kualitatif, di mana objek dipandang sebagai hal yang terus bergerak dan dilakukan untuk menyelidiki objek dalam keadaan alaminya. Dalam hal ini, peneliti berfungsi sebagai alat utama. Bertujuan untuk mengumpulkan suatu variabel atau tema, kondisi, atau fenomena yang ada sesuai dengan kenyataan saat penelitian dilakukan.³

Data dan informasi dikumpulkan langsung dari responden dalam penelitian ini. Penelitian ini akan meneliti secara langsung individu yang terlibat dalam pasar desa.

¹ Sri Ilham Nasution and S Sos, *Psikologi Sosial* (Selat Media, 2023).

² Ray Pratama, "Pengertian," *Jenis-Jenis, Dan Tujuan Pemidanaan* <https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Jenis-Jenis-Dan-Tujuan.Html>, 2012.

³ Ben Kei Daniel and Tony Harland, 'Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology', *Higher Education Research Methodology: A Step-by-Step Guide to the Research Process*, 2017, 1-140 <<https://doi.org/10.4324/9781315149783>>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menemukan fakta status sekelompok orang, objek, kondisi, sistem pemikiran, dan peristiwa saat ini dengan interpretasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Malalak Utara, didapatkan beberapa hasil yaitu:

1. Kondisi Pasar Nagari Malalak Utara

Untuk kondisi pasar, dijelaskan oleh Wali Nagari Bapak Abdul Hamid sebagai berikut.

“kondisi pasar saat ini berjalan dengan baik, dan pasar ini beroperasi pada hari kamis pukul 06.00 hingga pukul 11.00.”⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi pasar saat ini lancar dan tidak ada hambatan yang signifikan untuk jual beli. Pasar ini telah lama ditetapkan sebagai hari pasar di wilayah Malalak, dan beroperasi setiap hari Kamis mulai pukul 06.00 hingga 11.00. Jam operasional yang dimulai sejak pagi hari memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitas lain setelah berbelanja.

Meskipun pasar ini hanya berlangsung hingga pukul 11.00, hal tersebut tidak sepenuhnya membatasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pasalnya, masih terdapat pasar lain di daerah sekitar yang beroperasi hingga pukul 18.00, dengan jarak tempuh yang relatif dekat. Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki akses alternatif untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari maupun persediaan selama satu minggu kedepan.

2. Sejak Kapan Pasar Dikelola oleh Pemerintah Nagari

Awal mula pasar ini dikelola oleh pemerintah Nagari Bapak Abdul Hamid, dijelaskan oleh Wali Nagari sebagai berikut.

“Pasar ini dikelola oleh pemerintahan Nagari sejak tahun 2018 dan sebelum itu pasar ini hanya berjalan tanpa adanya aturan dan pihak yang mengawasi.”⁵

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa pasar ini mulai dikelola secara resmi oleh pemerintah Nagari Malalak Utara sejak tahun 2018. Pengelolaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan peran pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Sejak pengambilalihan pengelolaan tersebut, sejumlah kebijakan mulai diterapkan untuk memperbaiki tata kelola pasar, seperti pengaturan lokasi pedagang dan peningkatan kebersihan lingkungan pasar. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan jam operasional yang terbatas, keterlibatan pemerintah nagari sejak tahun 2018 menandai langkah awal menuju penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Pasar

Untuk pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar, dijelaskan oleh Wali Nagari Bapak Abdul Hamid sebagai berikut.

“Pemerintahan Nagari bekerjasama dengan BUMNag dalam pengelolaan

⁴ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

⁵ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

pasar dan kemudian BUMNag bekerjasama dengan Karang Taruna.”⁶

Dapat disimpulkan secara struktural, pasar ini memang tidak langsung dikelola oleh pemerintah nagari. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah nagari telah memberikan amanah kepada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam pengelolaan pasar. BUMNag kemudian menjalin kerja sama strategis dengan organisasi kepemudaan Karang Taruna untuk mendukung operasional harian pasar, termasuk dalam aspek teknis seperti pengaturan lapak pedagang, kebersihan lingkungan pasar, serta keamanan selama jam operasional.

Kolaborasi antara BUMNag dan Karang Taruna ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam tata kelola ekonomi lokal, di mana elemen pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda, dilibatkan secara aktif. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pengelolaan pasar tidak hanya berjalan lebih efisien, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan pemuda dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari secara menyeluruh.

4. Bentuk Peran Aktif Pemerintah Nagari

Peranan pemerintah nagari sangat penting dalam pengelolaan semua sumber daya nagari, termasuk potensi pasar, yang merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan pemerintah nagari untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat nagari. Dalam penelitian ini, peran pemerintah nagari diukur dengan beberapa indikator

penelitian. Setiap indikator berikut menunjukkan hasil penelitian:

a. Sebagai Stabilisator

Dalam penelitian ini, peran pemerintah sebagai stabilisator dilihat dari peranan pemerintah nagari dalam mengelola pasar nagari. Penelitian ini melihat peran pemerintah sebagai stabilisator ketika menghasilkan gejolak sosial yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan nasional.

1) Menetapkan Pengelola Pasar Nagari

Pemerintah Nagari Malalak utara telah memfasilitasi pasar Nagari untuk mendukung ekonomi masyarakat. Pemerintah Nagari menciptakan BUMNag untuk mengelola pasar desa yang ada, tempat masyarakat nagari berdagang dan berinteraksi. Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Hamid, Wali Nagari Malalak Utara, adalah sebagai berikut:

“Pengelolaannya sudah berjalan dengan baik, untuk penetapan diatur oleh BUMNag. Langkah pemerintah nagari dalam mengelola pasar nagari ini sudah baik, karena adanya peran BUMNag didalam pengelolaan pasar dan dibantu oleh Karang taruna.”⁷

Pasar Nagari Malalak Utara saat ini dikelola oleh BUMNag. Langkah pemerintah nagari ini dalam mengelola pasar desa ini sudah baik karena BUMNag berperan dalam pengelolaan pasar dan dibantu oleh Karang Taruna Nagari. Diharapkan keberadaan pasar Nagari mampu menghidupkan perekonomian masyarakat nagari. Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Junaidi, Ketua BAMUS Nagari

⁶ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

⁷ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Malalak Utara: Wawancara dilakukan di rumah Bapak Junaidi pada tanggal 5 Mei 2025. Tanggapan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan pasar desa saat ini berjalan dengan baik. Pasar desa telah ditetapkan oleh BUMNag, yang bekerja sama dengan Karang Taruna Nagari, dan lebih dikelola daripada sebelumnya.

Selain itu, dalam wawancara dengan Bapak Abdul Halim, Ketua BUMNag Nagari Malalak Utara, ditemukan bahwa "Sudah baik, karena pemerintah desa memberikan kewenangan untuk mengelola pasar nagari ini kepada BUMNag. Langkah pemerintah desa sudah baik dengan memberikan kewenangan pengelolaan pasar kepada BUMNag, karena BUMNag mengetahui tujuan dalam pengelolaan pasar tersebut." Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memberikan kewenangan pengelolaan pasar kepada BUMNag

5. Regulasi Khusus Yang Dibuat Pemerintah Nagari

Regulasi khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan pasar, dijelaskan oleh Wali Nagari Bapak Abdul Hamid sebagai berikut.

*"Untuk regulasi tertulis sampah saat ini belum ada, pasar hanya berjalan senyamannya bersama saja. Tapi ada rencana kami untuk melakukan musyawarah bersama masyarakat untuk merumuskan peraturan tertulis."*⁸

Dapat disimpulkan untuk saat ini, regulasi tertulis yang secara khusus mengatur pasar tradisional ini belum tersedia. Pengelolaan pasar masih berjalan

berdasarkan kesepakatan bersama dan kebiasaan yang sudah terbentuk secara turun-temurun. Meskipun demikian, perlu ada aturan yang jelas dan tertulis yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk tata kelola pasar. Ini terutama berlaku dalam hal pembagian peran antar pihak, pengaturan teknis untuk operasi, dan perlindungan hak dan kewajiban pedagang dan konsumen. Oleh karena itu, kami berharap musyawarah nagari dalam waktu dekat akan menyusun dan menetapkan regulasi pasar secara resmi. Regulasi ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pengelolaan pasar oleh BUMNag dan Karang Taruna, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

6. Kendala Koordinasi dengan Instansi Lain

Dari wawancara bersama Wali Nagari Malalak Utara, Bapak Abdul Hamid dijelaskan bahwa.

*"Sampah saat ini sih belum ada kendala ya dalam berkoordinasi aman semua."*⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, tidak ada hambatan yang signifikan dalam proses koordinasi antara pemerintah nagari dengan instansi terkait seperti dinas pasar dan pihak kepolisian.. Hubungan kerja sama sejauh ini berjalan cukup baik dan kondusif. Komunikasi antar lembaga juga berlangsung secara lancar, terutama dalam hal pengaturan jadwal kegiatan pasar, pengawasan keamanan, dan penataan pedagang.

Namun demikian, meskipun belum muncul kendala secara eksplisit, hal ini

⁸ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

⁹ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

bukan berarti potensi permasalahan tidak ada. Dalam praktiknya, kadang terdapat perbedaan cara pandang atau prioritas antara pemerintah nagari dan instansi vertikal, terutama dalam hal kebijakan teknis atau alokasi sumber daya. Hanya saja, sampah saat ini perbedaan tersebut masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Kedepan, tentu perlu diantisipasi agar mekanisme koordinasi tetap terjaga dan mampu beradaptasi jika terjadi perubahan regulasi atau dinamika sosial ekonomi di pasar.

7. Bantuan atau Pelatihan untuk Pedagang

Dari wawancara bersama Wali Nagari Malalak Utara, Bapak Abdul Hamid dijelaskan bahwa.

“sejauh ini belum ada bantuan atau pelatihan yang diberikan, tapi memang ada wacana kedepannya kami perlu koordinasikan dulu dengan dinas terkait.”¹⁰

Sehingga dapat disimpulkan, sampah saat ini pemerintah nagari memang belum secara langsung memberikan bantuan maupun pelatihan kepada para pedagang pasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa keterbatasan, baik dari segi anggaran maupun kewenangan yang lebih banyak berada di tangan instansi di tingkat kabupaten, seperti dinas koperasi, perdagangan, atau dinas pasar.

Meski demikian, disadari bahwa pelatihan dan bantuan sangat penting bagi peningkatan kapasitas pedagang, baik dalam hal manajemen usaha, digitalisasi transaksi, maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, kedepan ada rencana untuk menjalin koordinasi lebih

intensif dengan dinas terkait agar kegiatan pembinaan ini bisa diupayakan, minimal dalam bentuk program bersama atau fasilitasi akses terhadap pelatihan yang disediakan oleh instansi vertikal. Ini menjadi catatan penting bagi kami agar pengelolaan pasar tidak hanya fokus pada aspek fisik, tapi juga pada pemberdayaan SDM pelaku pasar.

8. Infrastruktur yang Disediakan Pemerintahan Nagari

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara, Bapak Abdul Hamid, diperoleh penjelasan bahwa.

“Untuk infrastruktur sampah saat ini belum ada ya, tapi kami sudah lama mengusulkan anggarannya bahkan itu hamper setiap periode. Kami juga merasa kalau fasilitasnya baik ya pembeli lebih nyaman dan akan menarik lebih banyak pengunjung lagi tapi ya pembangunan ini juga selalu ditolak karena lahan yang kurang memadai jadi kalau ingin dilakukan pembangunan mungkin akan dipindahkan ke tempat lain.”¹¹

Dari wawancara tersebut, didapat informasi bahwa belum ada infrastruktur yang secara langsung dibangun oleh pemerintah nagari untuk pasar. Namun, upaya ke arah itu sebenarnya sudah lama diusahakan. Sudah beberapa kali diusulkan anggaran untuk pembangunan fasilitas pasar, bahkan hampir di setiap periode pengajuan pembangunan pasar selalu masuk dalam daftar prioritas.

Disadari juga bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai sangat penting, bukan hanya untuk kenyamanan pedagang, tetapi juga untuk menarik minat pembeli agar betah dan merasa aman saat berbelanja.

¹⁰ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

¹¹ Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Fasilitas yang baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di pasar.

Sayangnya, hingga kini usulan tersebut belum dapat direalisasikan, terutama karena keterbatasan lahan yang tersedia. Lokasi pasar saat ini dinilai kurang layak untuk pembangunan infrastruktur yang ideal, sehingga jika rencana pembangunan tetap ingin dilanjutkan, besar kemungkinan pasar perlu dipindahkan ke lokasi lain yang lebih strategis dan sesuai secara teknis. Ini menjadi tantangan tersendiri yang harus dicari solusinya bersama, agar keinginan meningkatkan kualitas pasar bisa diwujudkan tanpa mengabaikan faktor keberlanjutan dan kenyamanan masyarakat.

9. Rencana Jangka Panjang Nagari

Penjelasan dari Wali Nagari Malalak Utara, Bapak Abdul Hamid, dalam sesi wawancara mengungkapkan bahwa.

“Rencana jangka panjang kami yang menjadi prioritas itu mengusahakan pencarian lahan untuk melakukan pembangunan pasar ini supaya lebih nyaman lagi kedepannya untuk pembeli dan pedagang.”¹²

Jadi, pemerintah nagari memang memiliki rencana jangka panjang terkait pengembangan pasar. Salah satu langkah strategis yang sedang diupayakan adalah mencari lokasi lahan baru yang lebih layak, nyaman, dan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Hal ini menjadi prioritas karena kondisi pasar saat ini dinilai kurang ideal untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

Pemerintah nagari memahami bahwa kenyamanan dan keamanan adalah faktor

penting, baik bagi pedagang maupun pembeli. Oleh karena itu, pemilihan lahan baru ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti aksesibilitas, potensi keramaian, dan dukungan lingkungan sekitar.

Harapannya, dengan tersedianya lahan yang tepat dan dukungan dari pemerintah kabupaten, proses pembangunan pasar baru dapat segera dimulai. Pemerintah nagari ingin menciptakan ruang usaha yang lebih representatif, yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar.

Pembahasan

Dari wawancara yang dilakukan dengan Pengelola Pasar Nagari Malalak Utara, didapatkan beberapa hasil yaitu:

1. Kebersihan dan Keamanan Pasar

Ketua BUMNag Malalak Utara sekaligus pengelola pasar, Bapak Doni Mahendra, dalam wawancara yang dilakukan menyampaikan bahwa.

“Untuk kebersihan dan keamanan pasar itu kami bekerjasama dengan karang taruna jadi mereka turun ke pasar dan meminta iuran sebesar Rp. 10.000 per lapak pedagang dan nanti kami bagi hasil yaitu 60% untuk BUMNag dan 40% untuk karang taruna.”¹³

Dari wawancara tersebut dapat kita ketahui dalam hal pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar, BUMNag bekerja sama dengan Karang Taruna Nagari. Setiap hari Kamis, anggota Karang Taruna secara rutin turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih pasar

¹² Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

¹³ Wawancara dengan Ketua BUMNag Malalak Utara Bapak Doni Mahendra di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 11.00 Wib

sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan di area pasar.

Model kerja sama ini sudah berjalan cukup baik dan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan pemuda nagari. Untuk mendukung kegiatan operasional ini, kami menerapkan sistem pembagian hasil dari iuran pasar, di mana 60% dialokasikan untuk BUMNag dan 40% diberikan kepada Karang Taruna sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Adapun iuran yang dikumpulkan berasal dari pedagang, yaitu sebesar Rp10.000 per lapak setiap kali berjualan.

Dengan sistem ini, diupayakan menjaga pasar tetap bersih dan aman secara berkelanjutan, sekaligus mendorong keterlibatan pemuda dalam pembangunan nagari. Tentu untuk kedepannya juga akan terus mengevaluasi dan meningkatkan mekanisme yang ada, agar pengelolaan pasar berjalan lebih efektif dan profesional.

2. Pengaturan Pedagang dan Lapak

Dari wawancara yang dilakukan dijelaskan bahwa.

“Untuk pedagang itu terbuka untuk siapa saja bukan hanya masyarakat sekitar, kalo untuk lapaknya itu pedagang yang sudah lama berjualan maka lapaknya susah tetap disana tapi kalo ada pedagang yang baru masuk itu kami carikan lokasi untuk lapaknya.”¹⁴

Diketahui dalam pengaturan pedagang dan penempatan lapak di pasar, sistem yang diterapkan cukup sederhana namun terstruktur. Untuk pedagang yang sudah lama berjualan, lapaknya sudah tetap dan tidak mengalami banyak perubahan. Mereka sudah memiliki posisi masing-masing yang secara

tidak langsung sudah menjadi bagian dari 'kawasan tetap' didalam pasar.

Sedangkan bagi pedagang baru yang ingin masuk dan mulai berjualan di pasar, disinilah peran pengelola menjadi lebih aktif. Pengelola bertugas mencari lokasi atau lapak yang masih tersedia dan cocok untuk mereka. Dalam proses ini, diupayakan seadil mungkin agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara pedagang, serta memastikan bahwa penataan tidak mengganggu alur pergerakan pembeli dan tidak menyebabkan pasar menjadi semrawut.

Adanya kesadaran bahwa pengaturan lapak bukan hanya soal teknis, tetapi juga berhubungan dengan kenyamanan, keteraturan, dan keberlanjutan pasar itu sendiri. Oleh karena itu, pengelola selalu berusaha melakukan pendekatan secara dialogis dengan para pedagang, agar kebijakan penempatan ini diterima secara musyawarah dan tidak menimbulkan konflik.

3. Pengaturan Parkir

Dari wawancara bersama Bapak Rahmad selaku petugas parkir dijelaskan bahwa.

“Kalo untuk parkir ya belum ada lokasi khususnya hanya diarahkan untuk motor dan mobil parkir disepanjang jalan dengan rapi agar tidak menyebabkan kemacetan.”¹⁵

Dapat diketahui bahwa untuk saat ini, pengaturan parkir di sekitar area pasar masih dilakukan secara sederhana, karena belum tersedia lahan parkir yang khusus dan memadai. Oleh karena itu, kendaraan baik motor maupun mobil diarahkan untuk parkir di sepanjang pinggir jalan yang tersedia di sekitar pasar.

¹⁴ Wawancara dengan Ketua BUMNag Malalak Utara Bapak Doni Mahendra di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 11.00 Wib

¹⁵ Wawancara dengan Petugas Parkir Bapak Rahmad di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 11.30 Wib

Meskipun keterbatasan lahan menjadi tantangan utama, dari pengelola pasar tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama pada hari pasar yang biasanya ramai dan rawan macet. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengatur jarak antar kendaraan serta memastikan tidak ada kendaraan yang parkir di titik-titik yang bisa mengganggu akses masuk atau keluar pasar.

Pengelola pasar juga selalu bersiaga untuk melakukan pengaturan secara langsung dilapangan dan berkomunikasi dengan pengguna jalan maupun pengunjung pasar, agar kemacetan bisa segera diatasi jika terjadi penumpukan. Harapannya kedepan, jika tersedia lahan khusus untuk parkir, pengelolaan ini bisa menjadi lebih terorganisir dan nyaman, baik bagi pengunjung maupun warga sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa terkait peran pemerintah nagari dalam mengelola pasar tradisional perspektif ekonomi islam (studi kasus pasar nagari Malalak Utara kecamatan Malalak) diperoleh hasil sebagai berikut: Pasar Nagari Malalak Utara yang sejak 2018 dikelola oleh BUMNag di bawah pengawasan pemerintah nagari, dan rutin setiap hari Kamis. Pemerintah nagari memberi mandat kepada BUMNag dengan melibatkan karang taruna dalam menjaga kebersihan dan keamanan, serta mengatur iuran dan pembagian hasil secara teratur.

Namun, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti belum adanya regulasi tertulis, minimnya bantuan pelatihan bagi pedagang, dan keterbatasan infrastruktur akibat kendala lahan. Pedagang dan pembeli umumnya merasa lebih nyaman karena tidak ada lagi pungutan liar, namun masih mengeluhkan kemacetan dan kondisi pasar saat hujan.

Secara keseluruhan, pengelolaan pasar ini telah membawa perubahan positif, terutama dalam hal ketertiban. Kedepan,

dibutuhkan peningkatan peran pemerintah nagari melalui regulasi, penyediaan fasilitas yang layak, serta program pemberdayaan pedagang agar pengelolaan pasar lebih optimal dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum," 2021.
- Kei Daniel. Ben and Tony Harland, 'Metodologi Penelitian Pendidikan Education Research Methodology', *Higher Education Research Methodology: A Step-by-Step Guide to the Research Process*, 2017, 1–140 <<https://doi.org/10.4324/9781315149783>>.
- Sri Ilham Nasution and S Sos, *Psikologi Sosial* (Selat Media, 2023).
- Ray Pratama, "Pengertian," *Jenis-Jenis, Dan Tujuan Pemidanaan* <https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Pengertian-Jenis-Jenis-Dan-Tujuan.Html>, 2012.
- Refrenri D Sumilat, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi Di Pasar Langowan)," *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 3 (2021).
- Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib
- Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib
- Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib
- Wawancara dengan Wali Nagari Malalak Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor Nagari Malalak Utara pada tanggal 05 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Ketua BUMNag Malalak
Utara Bapak Abdul Halim di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei

Wawancara dengan Wali Nagari Malalak
Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Wali Nagari Malalak
Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Wali Nagari Malalak
Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Wali Nagari Malalak
Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Wali Nagari Malalak
Utara Bapak Abdul Hamid di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 09.00 Wib

Wawancara dengan Ketua BUMNag Malalak
Utara Bapak Doni Mahendra di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 11.00 Wib

Wawancara dengan Ketua BUMNag Malalak
Utara Bapak Doni Mahendra di Kantor
Nagari Malalak Utara pada tanggal 05
Mei 2025 pukul 11.00 Wib.